

Kasus Femisida di Amerika Latin dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pengungsi Gender di Amerika Serikat

Anggita Awalia Safirna¹, Imam Fadhil Nugraha²

¹² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

anggi060805@gmail.com,

imamfadhil86@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara meningkatnya kasus femisida di Amerika Latin dan peningkatan jumlah pengungsi gender yang mencari perlindungan di Amerika Serikat. Femisida, sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem dan sistemik, mendorong banyak perempuan untuk melakukan migrasi paksa guna menghindari kekerasan dan mendapatkan perlindungan hukum. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur akademik dan laporan organisasi internasional. Hasil tulisan menunjukkan bahwa sistem patriarki, impunitas hukum, serta diskriminasi struktural di negara asal menjadi faktor utama pendorong migrasi. Namun, para pengungsi gender menghadapi tantangan besar di Amerika Serikat karena kebijakan suaka yang cenderung eksklusif dan represif. Pendekatan interseksional digunakan untuk mengungkap kompleksitas identitas perempuan migran dan mendesak perlunya kebijakan perlindungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kerentanan berlapis yang mereka alami

Kata Kunci: Femisida; Pengungsi Gender; Migrasi Paksa; Amerika Latin.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the link between the increasing cases of femicide in Latin America and the rise of gender-based refugees seeking protection in the United States. Femicide, as an extreme and systemic form of gender-based violence, has forced many women to flee their countries to escape violence and seek legal protection. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach, utilizing literature review from academic sources and international organizational reports. The findings reveal that patriarchy, legal impunity, and structural discrimination in the country of origin are major push factors for migration. However, gender refugees face significant challenges in the U.S. due to restrictive and repressive asylum policies. An intersectional approach is applied to uncover the complexity of migrant women's identities and to advocate for more inclusive and responsive protection policies that address their layered vulnerabilities.

Keywords: Femicide; Gender Refugees; Forced Migration, Latin America.



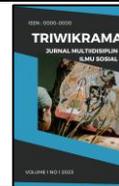
1. PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus femisida yang terjadi di kawasan Amerika Latin serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan jumlah pengungsi dari kekerasan berbasis gender dan mencari suaka di Amerika Serikat. Sederhananya, femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem dan sistematis terhadap perempuan lalu sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam diskursus tentang migrasi internasional maupun dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberian suaka. Tulisan ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kekerasan berbasis gender, khususnya femisida, tidak hanya berdampak pada kehidupan individu tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih luas hingga berupa migrasi paksa.

Femisida diartikan sebagai pembunuhan misoginis (kebencian) terhadap perempuan oleh laki-laki dan manifestasi ekstrem dari kekerasan seksual (Russell, 2011). Pembunuhan misoginis ini berfokus pada keinginan laki-laki untuk mendapatkan kekuasaan, dominasi, dan kendali terhadap perempuan (Kelly, 1988, p. 12). Iranzo mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena dia dianggap telah mempermalukan atau menyinggung kehormatan laki-laki atau masyarakat patriarki. Biasanya, pelaku merasa bahwa perempuan tersebut telah melanggar aturan atau norma "kehormatan" dan karena itu pantas dibunuh. Alasan sebenarnya adalah karena perempuan itu dianggap menentang kekuasaan laki-laki (Iranzo, 2015, p. 13). Dari definisi-definisi tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem sosial, hukum, dan politik tidak melakukan apa yang seharusnya melindungi hak hidup dan martabat perempuan (Kadir, 2025, p. 72). Budaya *machismo* yang kental di Amerika Latin juga berperan dalam memperkuat pola kekerasan terhadap perempuan, dengan menciptakan lingkungan yang menormalisasi ketidaksetaraan gender. Hal ini membuat perempuan sering merasa direndahkan dan terpinggirkan, serta lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan (Hallock et al., 2018).

Di Amerika Latin sendiri, statistik kasus femisida setiap tahunnya terus meningkat. Dilansir dari Economic Commission for Latin America and the Caribbean ditemukan setidaknya 4.050 perempuan telah dibunuh oleh pria di 26 negara dan wilayah Amerika Latin dan Karibia pada tahun 2022. (The Economic Commission for Latin America (ECLAC), 2023). Misalnya, di Honduras, El Salvador, Guatemala, dan Kolombia, tingkat pembunuhan terhadap perempuan (femisida) berkisar antara enam hingga 14 per 100.000 penduduk dan delapan hingga 24 kali lebih tinggi daripada tingkat di Kanada (Frate, 2011, p. 15). Meskipun beberapa negara telah mengesahkan undang-undang untuk mengurangi tingkat pembunuhan terhadap perempuan (femisida) melalui reformasi hukum pidana dan undang-undang lainnya, namun upaya tersebut hanya mengatasi sebagian masalah dan angka kasus tetap meningkat (Castano, 2024, p. 77).

Negara-negara di Amerika Latin yang dibangun di atas warisan kolonial yang penuh kekerasan, terus menghadapi berbagai bentuk krisis seperti ketidakstabilan politik, perang saudara, dominasi mafia narkoba, dan kekuasaan militer yang otoriter. Warisan kolonial ini tidak hanya menciptakan kekerasan sistemik, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial, memperkuat rasisme, dan membentuk pola hubungan gender yang timpang dan penuh ketidakadilan, yang dikenal sebagai 'coloniality of gender' (Lugones, 2010, p. 743) (Segato, 2012, p. 107). Faktor inilah menjadi salah satu penyebab awal mula yang memicu kasus femisida di Amerika Latin marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah juga telah dikritik karena gagal secara terbuka mengancam femisida dan menyebarluaskan informasi kepada publik (Ferguso & Bejarano, 2010). Perempuan korban kekerasan seringkali tidak mendapatkan keadilan di negara asalnya,



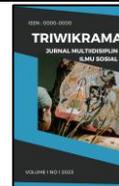
sehingga memilih melarikan diri demi keselamatan. Amerika Latin dan Karibia mencakup 14 dari 25 negara paling mematikan di dunia bagi perempuan. Keadilan jarang ditegakkan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebanyak 98 persen kasus pembunuhan terkait gender di Amerika Latin tidak pernah diproses secara hukum (Westbrook, 2020). Secara khusus juga, publik kurang memiliki pengetahuan tentang penerapan hukum di negaranya mengenai kekerasan berbasis gender serta bagaimana hukum tersebut berdampak terhadap korban dan pelaku.

Hal ini menjadikan alasan pengungsi gender meningkat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat yang menjadi sasaran empuk para korban femisida. Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam karakteristik migran yang tiba di perbatasan AS-Meksiko. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan yang mencoba menyeberangi perbatasan Meksiko ke AS meningkat tajam antara tahun 2018 dan 2019 (Westbrook, 2020). Contohnya di tahun 2014 jumlah migran dari kawasan 'Northern Triangle'—El Salvador, Guatemala, dan Honduras meningkat secara tajam. Grafik migran ini mencerminkan dinamika migrasi yang semakin dipengaruhi oleh faktor kekerasan, kemiskinan, dan ketidakamanan di negara asal (Hallock et al., 2018). Dilansir dari Migration Policy Institute, masing-masing negara memiliki alasan migrasi yang berbeda. Contohnya, di negara El Salvador dan Honduras, banyak orang mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penculikan, pemerasan, dan perekrutan paksa oleh kelompok-kelompok tertentu yang membuat mereka merasa tidak aman. Anggota kelompok tersebut memaksa perempuan untuk terlibat dalam hubungan seksual dan perlawanan terhadap hal ini dapat berujung pada aksi femisida. Sedangkan, migrasi dari Guatemala lebih sering terkait dengan kekerasan umum, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama di kalangan masyarakat adat. Meskipun alasan ini tidak berlaku untuk setiap kasus migrasi berbasis gender, tapi hal ini dapat berfungsi sebagai indikator yang berguna untuk lebih memahami rekor jumlah perempuan Amerika Latin yang bermigrasi ke Amerika Serikat (Hallock et al., 2018).

Dengan merujuk pada informasi yang telah disampaikan di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji dampak dari femisida di Amerika Latin terhadap peningkatan jumlah pengungsi gender yang tiba di Amerika Serikat. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong perempuan dari negara-negara tersebut untuk meninggalkan tanah air mereka demi mencari keselamatan, serta bagaimana kekerasan berbasis gender, khususnya femisida, berkontribusi pada dinamika migrasi yang terjadi di Amerika Serikat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena meningkatnya migrasi berbasis gender di Amerika Latin ke Amerika Serikat merupakan respons terhadap tingginya angka femisida dan kekerasan berbasis gender di negara asal. Secara global, migrasi yang dilakukan oleh perempuan kerap kali didorong oleh kondisi kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka (Menjivar & Walsh, 2019, p. 45), dengan demikian bisa dikatakan bahwa migrasi menjadi strategi bertahan hidup bagi perempuan terhadap struktur kekerasan yang sistemik. Sejak diberlakukannya *Immigration and Nationality Act* pada tahun 1965, arus migrasi menuju Amerika Serikat dari negara-negara di kawasan Amerika Latin mengalami peningkatan signifikan. Migran asal Meksiko menjadi kelompok terbesar dalam tren ini, disusul oleh migran dari sejumlah negara lain di Amerika Latin dan kepulauan Karibia (Donato, 2010, p. 79). Data dari UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sekitar 82 persen perempuan asal El Salvador, Honduras, Guatemala, dan Meksiko yang menjalani penyaringan di perbatasan Amerika Serikat memiliki peluang besar untuk memenuhi kriteria



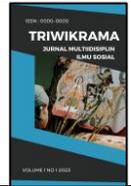
kelayakan sebagai pencari suaka (UNHCR, 2015). Tingginya angka femisida di Amerika Latin telah mendorong meningkatnya permohonan suaka oleh perempuan di wilayah tersebut.

Permohonan suaka umumnya merupakan konsekuensi dari migrasi paksa yang dipicu oleh berbagai faktor. Dalam tulisan ini, fokus utama akan diarahkan pada migrasi paksa yang disebabkan oleh kekerasan berbasis gender khususnya femisida. Maka penting untuk memahami konsep migran paksa secara lebih menyeluruh terlebih dahulu. Istilah migran paksa (*forced migrants*) merujuk pada individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat tekanan atau ancaman serius, dan mencakup berbagai kategori seperti pengungsi internal (*internally displaced persons*), pengungsi yang telah diakui maupun yang masih dalam proses penentuan status, pencari suaka yang permohonannya telah ditolak, dan mereka yang belum secara resmi mengajukan permohonan suaka. (Phillimore et al., 2022, p. 717).

Salah satu bentuk paling ekstrem kekerasan berbasis gender di Amerika Latin adalah femisida. Femisida di Meksiko telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata 10 perempuan terbunuh setiap harinya. Sejak tahun 2015, angka ini mengalami peningkatan sebesar 137 persen, empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pembunuhan umum (*homicide*). Dalam beberapa tahun terakhir, pola kekerasan ini semakin brutal dan demonstratif, di mana korban kerap ditemukan dalam kondisi mengenaskan di ruang publik. (Wilson Center, n.d.). Survei yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional Meksiko (INEGI) pada tahun 2016 terhadap lebih dari 142.000 rumah tangga mengungkapkan bahwa 66,1 persen perempuan melaporkan pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Dari jumlah tersebut, sekitar separuh melaporkan kekerasan emosional, sementara hampir 40 persen menyatakan pernah menjadi korban kekerasan seksual, menunjukkan prevalensi yang tinggi dan kompleksitas masalah kekerasan berbasis gender di negara tersebut. (INEGI, 2016).

Amerika Serikat memiliki komitmen jangka panjang terhadap perlindungan pengungsi, termasuk kewajiban untuk tidak mengembalikan individu ke negara asalnya jika berisiko mengalami penyiksaan atau penganiayaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *non-refoulement* (anti-pengusiran) oleh negara seperti Amerika Serikat menjadi krusial dalam memastikan bahwa perempuan *forced migrants* tetap mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas keselamatan. Melalui disahkannya *Refugee Act* tahun 1980, kebijakan suaka Amerika Serikat mulai sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951. Undang-undang ini mengatur bahwa perlindungan suaka diberikan kepada individu berdasarkan lima kriteria utama: ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu (*Particular Social Group* atau PSG) (United Nations, 1951). Untuk memperoleh status suaka, pemohon harus dapat membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang secara hukum diakui sebagai rentan terhadap penganiayaan, serta menunjukkan bahwa mereka telah mengalami atau berpotensi mengalami penganiayaan yang memiliki dasar kuat, yang terkait langsung dengan identitas kelompok tersebut. (Akbari & Vogler, 2021, p. 2).

Namun perlindungan suaka atas dasar gender di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh dinamika dan perubahan kebijakan politik. Contohnya putusan '*Matter of A-B-*' pada masa pemerintahan Trump berupaya menghapus perlindungan suaka bagi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan memanfaatkan tidak dicantumkannya kategori gender dalam *Refugee Act* 1951 sebagai dasar pembenaran bagi kebijakan tersebut (Malkani, n.d.). Putusan tersebut menegaskan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai anggota dari kelompok sosial tertentu (*particular social group*) (Molina et al., 2019, pp. 24-26). Hal ini menyebabkan pencari suaka akibat kekerasan berbasis gender di Amerika Serikat berada di situasi yang sulit untuk bertahan hidup.



Literatur-literatur yang telah ditinjau menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender, terutama femisida, telah mendorong migrasi paksa perempuan dari Amerika Latin ke Amerika Serikat. Konsep migrasi berbasis gender serta kerangka *forced migrants* menjadi dasar penting untuk memahami pengalaman migran perempuan dalam konteks ini. Di sisi lain, literatur yang membahas kebijakan suaka di AS menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap kekerasan berbasis gender sebagai dasar permohonan suaka, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kebijakan yang berubah-ubah.

Tulisan ini akan memanfaatkan pendekatan interseksionalitas (Crenshaw, 1991, p. 1242) untuk melihat bagaimana pengalaman migrasi perempuan dibentuk oleh berbagai lapisan identitas dan kekuasaan, seperti gender, status hukum, dan kewarganegaraan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kebijakan atau statistik makro, tulisan ini akan menekankan pada pengalaman perempuan sebagai aktor yang terdampak langsung oleh femisida dan bagaimana mereka menghadapi sistem suaka di AS. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat mengisi celah dalam kajian migrasi paksa yang belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada suara dan pengalaman perempuan migran itu sendiri.

3. METODE

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitik guna memahami dinamika migrasi paksa berbasis gender dari Amerika Latin ke Amerika Serikat, khususnya akibat femisida. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur akademik, laporan lembaga internasional (seperti UNHCR dan *Migration Policy Institute*), serta dokumentasi kasus dari media terpercaya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dalam narasi pengungsi dan kebijakan suaka AS. Tulisan ini dibatasi pada data yang tersedia secara publik dan tidak mencakup wawancara langsung dengan pencari suaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus femisida di Amerika Latin merupakan wujud nyata dari kekerasan berbasis gender yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diproduksi dan dipelihara oleh struktur sosial yang patriarkal dan sistem hukum yang lemah. Budaya patriarki yang mengakar kuat memperkuat dominasi laki-laki dan merendahkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, femisida menjadi bentuk kekerasan paling ekstrem yang dilegitimasi oleh ketimpangan gender, impunitas, serta kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Banyak dari korban kekerasan ini terpaksa melakukan migrasi, baik secara internal maupun lintas negara, demi menyelamatkan diri dari ancaman kekerasan yang terus meningkat.

Namun, migrasi bukanlah akhir dari perjuangan. Perempuan yang menjadi pengungsi gender kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari birokrasi imigrasi yang represif, diskriminasi rasial dan gender, hingga stereotip yang menyudutkan. Sistem suaka di negara-negara tujuan, termasuk Amerika Serikat sering kali belum responsif terhadap kompleksitas pengalaman perempuan migran. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan interseksionalitas dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bagaimana beragam aspek identitas seperti gender, ras, kelas, dan status migrasi



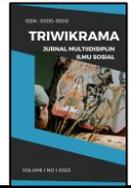
saling berkaitan dalam membentuk kerentanan, serta memastikan bahwa setiap korban kekerasan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

a. Femisida sebagai Kekerasan Terstruktur.

Femisida tidak terjadi begitu saja melainkan merupakan hasil dari kekerasan yang terstruktur dalam sistem sosial yang patriarki. Di Amerika Latin, terdapat budaya *machismo* yang menekankan dominasi laki-laki yang dikenal sebagai bentuk maskulinitas yang ekstrem dan konstruksi budaya yang membentuk identitas laki-laki secara berlebihan. Budaya ini ditopang oleh sistem kepercayaan yang membenarkan dan melanggengkan sikap serta perilaku dominatif, dengan tujuan utama mempertahankan kekuasaan laki-laki atas perempuan (ZCenter, 2024). Budaya *machismo* dipadukan dengan lemahnya penegakan hukum serta tingginya tingkat impunitas (pembebasan dari hukuman), menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung tanpa hukuman. Dalam konteks ini, femisida menjadi manifestasi ekstrem dari ketidaksetaraan gender yang telah mengakar dan dilegitimasi oleh struktur hukum, politik, dan budaya setempat. Contohnya pada tahun 2000, penegakan hukum terhadap kasus femisida masih sangat lemah, yang tercermin dari hanya satu pelaku laki-laki yang berhasil diadili atas pembunuhan terhadap seorang perempuan muda (Fragoso, 2018, p. 920). Hal ini menandakan kurangnya penegakan hukum dalam kasus femisida.

Femisida yang sistemik dan berlapis mendorong perempuan mencari perlindungan ke luar negeri. Kekerasan ini tak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi juga menjadi pemicu migrasi paksa di tengah tingginya kekerasan berbasis gender dan impunitas (pembebasan dari hukuman). Contohnya di negara bagian wilayah Quintana Roo, terutama Riviera Maya, tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka migrasi internal tertinggi di Meksiko. Selain itu, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, kawasan ini juga menunjukkan tren migrasi eksternal yang cukup signifikan. (Lines, 2024, p. 3338). Proses migrasi juga menghadirkan tantangan tersendiri, di mana ketimpangan sosial ekonomi berbasis gender dapat memperbesar kerentanan individu terhadap kekerasan fisik, paksaan, dan eksploitasi, baik dalam proses keberangkatan, perjalanan, maupun saat mereka bermukim di tempat tujuan. (Freedman, 2016, p. 20). Namun hal tersebut tidak menghalangi para migran untuk berpindah dari negara nya karena ancaman keamanan atas kasus femisida yang terus bertambah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa femisida tidak dapat dipahami hanya melalui lensa ketimpangan gender semata, tetapi perlu dianalisis melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Istilah '*intersectionality*' yang diciptakan oleh Kimberlé Crenshaw awalnya dimaksudkan untuk menyoroti bahwa pengalaman perempuan kulit hitam tidak bisa diasumsikan hanya dipengaruhi oleh gender, karena gender berinteraksi dengan ketimpangan struktural lainnya, seperti ras, kelas, dan sebagainya. Namun, dalam memahami kasus femisida, pendekatan interseksionalitas membantu melihat masalah ini secara lebih menyeluruh. Tidak seperti pendekatan yang hanya berfokus pada patriarki, interseksionalitas menghindari pandangan yang menyamaratakan pengalaman perempuan (universalisme) (Caterini, 2023, p. 2). Pendekatan ini penting karena memungkinkan kita memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh gender, tetapi juga oleh ras, kelas sosial, status migrasi, atau faktor identitas lainnya yang saling berkaitan. Jika kita melihat femisida hanya dari sudut pandang patriarki, kita cenderung menganggap semua perempuan mengalami kekerasan dengan cara yang sama. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Perempuan miskin misalnya rentan terhadap femisida karena kurangnya akses hukum atau tempat aman bagi mereka untuk berlindung. Perempuan migran atau pencari suaka bisa saja menghadapi bahaya dari negara asal sekaligus kerentanan di negara tujuan. Pendekatan ini mendorong kita untuk tidak menyamaratakan pengalaman perempuan, dan justru mengakui kompleksitas realitas sosial yang mereka hadapi.



b. Tantangan Pengungsi Gender di Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat secara historis dikenal sebagai negara yang menjunjung perlindungan terhadap pengungsi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem suaka di negara ini kerap kali gagal merespons kebutuhan pengungsi berbasis gender. Hal ini tercermin dalam tingginya angka penolakan permohonan suaka yang diajukan oleh warga dari kawasan Amerika Latin. Pada tahun 2020, misalnya, warga Honduras, Guatemala, dan El Salvador yang merupakan kelompok pengungsi gender terbesar di kawasan Amerika Serikat mengalami tingkat penolakan yang sangat tinggi, yakni masing-masing sebesar 87,3%, 85,8%, dan 85,0% (TRAC Immigration, 2020). Sesampainya di Amerika Serikat untuk mencari perlindungan, para pengungsi gender harus menghadapi sistem birokrasi yang kompleks, mereka terperangkap dalam mekanisme kontrol negara dan pendekatan represif. Dalam dinamika ini, kebutuhan mendesak mereka untuk memperoleh perlindungan justru sering kali diabaikan (Menjívar & Cervantes, 2025, pp. 69-70).

Persepsi sosial di Amerika Serikat yang mengaitkan *forced migrants* dari Amerika Latin dan warna kulit dengan status imigran tidak berdokumen telah memperkuat praktik diskriminatif. Hal ini menyebabkan komunitas Latin secara tidak proporsional menjadi sasaran pengawasan negara dan kebijakan deportasi. (Menjívar & Cervantes, 2025, p. 71). Terbatasnya akses bagi perempuan untuk memperoleh status hukum melalui jalur resmi membuat banyak dari mereka terjebak dalam status tidak berdokumen. Selain itu, konstruksi stereotip yang mereduksi perempuan *forced migrants* sebagai beban terhadap sistem kesejahteraan turut memperkuat legitimasi negara dalam melakukan kontrol dan penindakan imigrasi terhadap perempuan *forced migrants* (Hartry, 2012, p. 21). Representasi media dan wacana publik yang semakin diperkuat selama masa kepresidenan Trump, secara rutin membingkai perempuan Amerika Latin sebagai penipu sistem suaka, sehingga mereka sejak awal sudah dicurigai (Menjívar & Cervantes, 2025, p. 73). Selama masa pemerintahan Trump, ratusan kebijakan diberlakukan ditujukan untuk membatasi dan menghalangi akses pencari suaka dari kawasan Amerika Latin. Langkah-langkah ini memperkuat pendekatan eksklusiver (mengucilkan) dalam sistem imigrasi Amerika Serikat, khususnya terhadap kelompok yang paling rentan seperti perempuan korban kekerasan berbasis gender (Guttentag, 2021).

Berbagai tantangan terus membayangi para *forced migrants*, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender seperti femisida yang melarikan diri dari negara asalnya. Sistem suaka di Amerika Serikat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru sering kali menjadi ladang baru untuk penindasan. Kebijakan yang mengucilkan, stereotip media yang menyudutkan, serta praktik kriminalisasi imigran yang berbasis ras, gender dan status imigrasi telah menciptakan pengalaman yang tidak ramah bagi pencari suaka. Perempuan migran kerap diposisikan dalam kerentanan berlapis. Mereka dicurigai, dikriminalisasi dan disisihkan dari akses keadilan.

c. Pendekatan Interseksionalitas dalam Penerapan Kebijakan Terhadap Pengungsi Gender di Amerika Serikat

Kebijakan terkait kekerasan gender selama ini cenderung melihat korban sebagai kelompok homogen, padahal kenyataannya tidak demikian. Pada tahun 2015 *United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women* mengidentifikasi femisida sebagai isu global dengan membentuk program '*Femicide Watch*' (UNHCR, 2016). Lebih lanjut, pada tahun 2018, mekanisme tindak lanjut terhadap Konvensi Belém do Pará (lembaga pengawas) menyatakan bahwa femisida merupakan "manifestasi paling serius dari diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan" di



Amerika Latin (Deus & Gonzalez, 2018). Sejak tahun 2007, sebanyak delapan belas negara di kawasan Amerika Latin telah mengadopsi peraturan perundang-undangan tersebut secara eksplisit mengkriminalisasi tindak femisida sebagai bentuk komitmen terhadap penanggulangan kekerasan berbasis gender dan pemenuhan kewajiban internasional mereka. Namun demikian, kendati terdapat kemajuan normatif, impunitas terhadap pelaku femisida masih menjadi tantangan serius yang menghambat efektivitas implementasi hukum. (Padilla, 2022, p. 115).

Perempuan di Amerika Latin harus menjalani kehidupan sehari-hari mereka di tengah dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Militerisasi yang terus berlangsung di kawasan ini tidak lepas dari sejarah kolonialisme, rezim diktator, dan perang sipil yang menggunakan penyiksaan terhadap warga sipil rentan serta merendahkan martabat perempuan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan politik (Ferguso & Bejarano, 2010). Dalam konteks ini, interseksionalitas menjadi alat penting untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ketimpangan dan diskriminasi bekerja secara bersamaan serta mengapa kebijakan yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap keragaman identitas sangat dibutuhkan. Suara perempuan selama ini sering kali kurang terwakili, dibungkam, dan kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan-kebijakan hukum (Caterini, 2023, p. 3). Interseksionalitas adalah sebuah alat yang memungkinkan individu untuk memahami berbagai sistem penindasan yang dihadapi perempuan, berdasarkan bagaimana beragam aspek identitas mereka saling terhubung dan membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender yang pada akhirnya dapat berujung pada pembunuhan. (Padilla, 2022, p. 118).

Pendekatan interseksionalitas mampu mengungkap bahwa tidak semua perempuan mengalami kekerasan dengan cara yang sama. Dalam hal suaka dan perlindungan pengungsi gender, pendekatan ini menyoroti bagaimana sistem hukum dan imigrasi harus mempertimbangkan tidak hanya jenis kelamin korban, tetapi juga kerentanan yang timbul dari identitas lain yang menyertainya. Tanpa perspektif ini, banyak perempuan yang justru tersisih dari perlindungan hukum karena dianggap tidak “cukup korban” menurut standar yang sempit dan universalistik. Dengan demikian, interseksionalitas bukan hanya alat analisis, melainkan juga landasan penting dalam merancang sistem perlindungan yang inklusif dan adil.

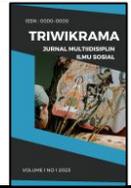
5. SIMPULAN DAN SARAN

Femisida di Amerika Latin bukanlah bentuk kekerasan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem ketidakadilan yang kompleks dan terstruktur, yang diperkuat oleh budaya patriarki, impunitas hukum, serta diskriminasi berbasis gender, ras, dan kelas. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa banyak perempuan yang terpaksa melarikan diri dari negara asal demi menyelamatkan diri, dan menghadapi tantangan baru dalam sistem suaka yang belum sepenuhnya berpihak kepada pengungsi gender. Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai negara penerima suaka, justru seringkali memperlihatkan praktik eksklusif dan kriminalisasi terhadap perempuan pengungsi. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada masih bersifat bias dan tidak responsif terhadap kerentanan berlapis yang dialami perempuan. Oleh karena itu, pendekatan interseksional menjadi sangat penting karena mampu menangkap dimensi kerentanan yang kompleks, serta menghindari penyamarataan pengalaman korban. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan perlindungan harus didesain dengan mempertimbangkan keragaman identitas dan pengalaman perempuan.

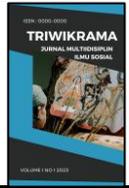


DAFTAR PUSTAKA

- ZCenter . (2024, January 17). *Machismo in Latino Culture*. Retrieved from Zacharias sexual abuse center: <https://zcenter.org/blog/machismo-in-latino-culture/>
- Akbari, R., & Vogler, S. (2021). Intersectional Invisibility: Race, Gender, Sexuality, and the Erasure of Sexual Minority Women in US Asylum Law. *Law & Social Inquiry*, 1-30.
- Castano, D. (2024, May 9). *Human Rights Research Center*. Retrieved from Femicide in Latin America: <https://www.humanrightsresearch.org/post/femicide-in-latin-america>
- Caterini, M. (2023). Moving Towards More Inclusive Definitions of Femicide: Intersectionality and Marginalised Identities. *Contemporary Challenges: The Global Crime, Justice and Security Journal* .
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 1241-1299.
- Deus, A., & Gonzalez, D. (2018). *ANALYSIS OF FEMICIDE/ FEMINICIDE LEGISLATION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN AND A PROPOSAL FOR A MODEL LAW*. Retrieved from UN WOMEN : <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2019/05/1Final%20Analysis%20of%20Femicide%20Legislation%20in%20Latin%20Americia%20and%20the%20Caribbean-compressed.pdf>
- Donato, K. M. (2010). U.S. Migration from Latin America: Gendered Patterns and Shifts. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 78-92.
- Ferguso, R.-L., & Bejarano, C. (2010). *TERRORIZING WOMEN: Femicide in the Americas*. Duke University Press.
- Fragoso, J. E. (2018). Femicide: Impunity for the Perpetrators and Injustice for the Victims. *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South*, 920.
- Frate, A. A. (2011). 'When the victim is a woman', in GD. In E. Gilgen, *Global Burden of Armed Violence 2011* (p. 15). Cambridge University Press & Assessment.
- Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee "crisis". *Reproductive Health Matters* , 20.
- Guttentag, L. (2021). Retrieved from Immigration Policy Tracking Project: <https://immpolicytracking.org/home/>
- Hallock et al. (2018, May 30). *Migration Policy Institute (MPI)*. Retrieved from In Search of Safety, Growing Numbers of Women Flee Central America: <https://www.migrationpolicy.org/article/search-safety-growing-numbers-women-flee-central-america>
- Hartry, A. S. (2012). Gendering Crimmigration: The Intersection of Gender, Immigration, and the Criminal Justice System. *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice*.



- INEGI. (2016). *National Survey on the Dynamics of Household Relationships (ENDIREH) 2016*. Retrieved from INEGI (Information on Government, Public Safety and Law Enforcement): <https://en.www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/>
- Iranzo, J. M. (2015). 'Reflections on femicide and violence against women'. *GESES*.
- Kadir, Z. K. (2025). Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya. *Crossroad Research Journal*, 71-97.
- Kelly, L. (1988). *Surviving sexual violence*. University of Minnesota Press.
- Lines, T. (2024). Portraits of feminicide: mural painting as protection among migrant women in Quintana Roo, Mexico. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Lugones, M. (2010). Toward a Decolonial Feminism. *Hypatia A Journal of Feminist Philosophy*, 742-759.
- Malkani, S. (n.d.). *Gender-Based Asylum in the US: The Case for a Sixth Ground Amid Legal Volatility*. Retrieved from Harvard Undergraduate Law Review: <https://hulr.org/spring-2025/gender-based-asylum-in-the-us-the-case-for-a-sixth-ground-amid-legal-volatility>
- Menjívar, C., & Cervantes, A. G. (2025). Maya Guatemalans Seeking Asylum: Race and Gender in a Continuum of State Control. *Sociol Race Ethn (Thousand Oaks)*.
- Menjívar, C., & Walsh, S. D. (2019). Gender, violence and migration. In K. Mitchell, R. Jones, & J. L. Fluri, *Handbook on Critical Geographies of Migration* (p. 45). Edward Elgar Publishing Limited.
- Molina et al., R. L. (2019). Impact of a US asylum decision on sexual and reproductive health and rights: a call to action for health and legal professionals. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 24-26.
- Padilla, M. (2022). A Path Forward to #NiUnaMenos Based on an Intersectional Analysis of Laws Criminalizing Femicide/Feminicide in Latin America. *University of San Diego School*.
- Phillimore et al., .. J. (2022). Forced Migration, Sexual and Gender-based Violence. *Journal of International Migration and Integration*.
- Russell, D. E. (2011, December). *THE ORIGIN AND IMPORTANCE OF THE TERM FEMICIDE*. Retrieved from Diana E. H. Russell, Ph.D: https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html
- Segato, R. L. (2012). Gender and coloniality: Looking for reading keys and a strategic decolonial vocabulary. *Journal CES* , 106-131.
- The Economic Commission for Latin America (ECLAC). (2023, November 23). *In 2022, At Least 4,050 Women Were Victims of Femicide in Latin America and the Caribbean: ECLAC*. Retrieved from ECLAC: <https://www.cepal.org/en/pressreleases/2022-least-4050-women-were-victims-femicide-latin-america-and-caribbean-eclac>
- TRAC Immigration. (2020). *Asylum Denial Rates Continue to Climb*. Retrieved from Transactional Record Access Clearinghouse: <https://trac.syr.edu/immigration/reports/630/>
- UNHCR. (2015). *Women on the Run*. Retrieved from UNHCR: <https://www.unhcr.org/us/women-run>



- UNHCR. (2016, November 24). *UN rights expert calls all States to establish a 'Femicide Watch'*. Retrieved from United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/11/un-rights-expert-calls-all-states-establish-femicide-watch>
- United Nations. (1951, July 28). *Convention relating to the Status of Refugees*. Retrieved from United Nations Human Rights Instruments (OHCHR): <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees>
- Westbrook, J. (2020, February 27). *The New Humanitarian*. Retrieved from How Mexico and Central America's femicide epidemic drives and complicates the migrant crisis: <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/02/27/Femicide-migration-Central-America-Mexico-US-Mexico-women-violence>
- Wilson Center. (n.d.). *Exploring the Data: The Prevalence of Gender-based Violence in Latin America*. Retrieved from Wilson Center: <https://gbv.wilsoncenter.org/explore-gbv-data>